

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan roda penggerak perekonomian bagi bangsa Indonesia. UMKM memiliki peranan yang penting bagi kemajuan perekonomian Indonesia. UMKM membantu pemerintah dalam upaya menyediakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan nasional negara. Selain itu, UMKM merupakan sektor ekonomi dengan jumlah yang mendominasi di Indonesia dan UMKM tetap mampu bersaing dalam krisis global (Warsono, 2010:5). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Sensus Ekonomi Indonesia pada tahun 2006 menyajikan data usaha/perusahaan sebanyak 22,73 juta usaha/perusahaan. Jika dibandingkan dengan Sensus Ekonomi 2016 yang berjumlah 26,71 juta usaha/perusahaan, berarti telah terjadi kenaikan sebanyak 17,5%. Dimana 98,33% dari 26,71 juta usaha tersebut adalah Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 1,67% adalah Usaha Menengah Besar (UMB). Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil naik 4,74% di tahun 2017 dibanding tahun 2016 (BPS, 2018).

Melihat pentingnya keberadaan UMKM, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk

menumbuhkan dan mengembangkan UMKM dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Di sisi lain, salah satu masalah yang sering terabaikan oleh pelaku UMKM adalah mengenai pengelolaan keuangan. Dampak yang ditimbulkan dari pengabaian pengelolaan keuangan mungkin tidak begitu terlihat jelas, namun entitas yang memiliki kemampuan untuk berhasil dapat mengalami kebangkrutan jika tidak menerapkan metode akuntansi dengan tepat (Ediraras, 2010). Untuk itu, penting sekali bagi pelaku UMKM untuk memahami dan menerapkan pencatatan keuangan dan penyajian laporan keuangan. Informasi yang tersaji pada laporan keuangan dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kegiatan bisnis dan pengambilan keputusan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi dan penyusun standar akuntansi keuangan melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada tahun 2009. Penetapan SAK ETAP diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan tanggungjawab UKM Indonesia. SAK ETAP ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP memuat 5 laporan keuangan, yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Faktanya, praktik penerapan SAK ETAP ini masih belum terlaksana secara optimal. Hal itu dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan dan

kompetensi sumber daya UMKM serta keterbatasan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sixpria *et al.* (2014) menjelaskan praktik akuntansi berdasarkan SAK ETAP di wilayah Depok masih belum terlaksana dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan akuntansi pelaku UMKM. Hidayat (2015) mengemukakan mengenai pemahaman UMKM di Kecamatan Sekupang Batam sangat rendah, di mana 85% UMKM tidak paham penerapan SAK ETAP. Pada umumnya, UMKM hanya membuat laporan yang sangat sederhana sesuai dengan pemahaman yang dimiliki, misalnya hanya melakukan pencatatan penjualan harian. Hendrian (2016) menjelaskan bahwa hanya 4% responden UMKM di Indonesia yang mengetahui fungsi informasi pada laporan keuangan dan mengetahui bagaimana penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki.

Maka dari itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan standar baru, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada tahun 2016. SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana yang telah didefinisikan dalam SAK ETAP yang memenuhi definisi dan kriteria UMKM sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. SAK EMKM diharapkan dapat lebih mempermudah UMKM dalam pembuatan

laporan keuangan entitas. Tanggal 1 Januari 2018 merupakan tanggal efektif penerapan SAK EMKM.

SAK EMKM memuat 3 laporan keuangan, yaitu: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan SAK EMKM memuat 3 informasi yaitu tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas di setiap akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas mencakup pos-pos berikut: kas dan setara kas; piutang; persediaan; aset tetap; utang usaha; utang bank; dan ekuitas. Laporan laba rugi SAK EMKM menyajikan informasi tentang pendapatan dan beban dari suatu entitas. Tujuan penyajian laporan laba rugi adalah untuk mengetahui kinerja keuangan entitas dalam suatu periode. Laporan laba rugi entitas mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan; beban keuangan; dan beban pajak. Sedangkan untuk catatan atas laporan keuangan SAK EMKM berisi hal-hal sebagai berikut: suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM; ikhtisar kebijakan akuntansi; serta informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material. Informasi tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas.

Persebaran UMKM telah merata di seluruh daerah di Indonesia, salah satunya yang berada di Kecamatan Jombang. Terdapat banyak UMKM dengan jenis/bidang usaha yang beragam di Kecamatan Jombang. UMKM

dengan produk yang berdaya saing tinggi dan pangsa pasar yang luas dapat dijadikan sebagai UMKM unggulan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Daerah dalam pasal (1) dijelaskan bahwa produk unggulan daerah merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Namun faktanya, pelaku UMKM unggulan yang berada di Kecamatan Jombang masih asing dengan pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang baik dan benar. Dalam beberapa bulan ini juga telah terjadi pergantian standar akuntansi bagi UMKM, yakni dari penggunaan SAK ETAP ke penggunaan SAK EMKM sehingga terdapat kemungkinan bagi pelaku UMKM unggulan untuk tidak mengetahui pergantian standar akuntansi yang telah ditetapkan. Padahal bagi pelaku UMKM unggulan penting sekali untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi sehingga bukan hanya sebagai UMKM yang unggul dari segi produk saja tetapi juga dapat diunggulkan dalam segala aspek, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang

dapat memberikan kontribusi lebih bagi perkembangan UMKM unggulan yang ada di Kecamatan Jombang. UMKM unggulan telah memiliki potensi yang mendukung dari segi kualitas produk namun tidak didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik maka dapat menghambat perkembangan UMKM unggulan yang ada di Kecamatan Jombang. Dari latar belakang tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISA KESIAPAN UMKM UNGGULAN DALAM PENERAPAN SAK EMKM DI KECAMATAN JOMBANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka rumusan masalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi di UMKM unggulan Kecamatan Jombang?
2. Bagaimana penerapan laporan keuangan di UMKM unggulan Kecamatan Jombang?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi pada rencana penerapan SAK EMKM di UMKM unggulan Kecamatan Jombang?
4. Bagaimana kesiapan UMKM unggulan dalam rencana penerapan SAK EMKM di Kecamatan Jombang?

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada penerapan akuntansi UMKM unggulan, penerapan laporan keuangan UMKM unggulan, hambatan yang terjadi, serta kesiapan UMKM dalam rencana penerapan SAK EMKM.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penerapan akuntansi UMKM unggulan di Kecamatan Jombang.
2. Mengetahui penerapan laporan keuangan UMKM unggulan di Kecamatan Jombang.
3. Mengetahui hambatan-hambatan UMKM unggulan dalam rencana penerapan SAK EMKM di Kecamatan Jombang.
4. Mengetahui kesiapan UMKM unggulan dalam rencana penerapan SAK EMKM di Kecamatan Jombang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka diharapkan manfaat penelitian ini dapat dirasakan oleh beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi UMKM

Hasil dari pada penelitian ini dimaksudkan mampu memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pelaku UMKM agar

menerapkan SAK EMKM yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dan evaluasi kinerja.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari pada penelitian ini dimaksudkan sebagai pilihan yang dapat menyajikan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 3. Bagi Pemerintah

Hasil dari pada penelitian ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam hal sumber informasi serta dapat dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan strategi bagi kemajuan pelaku UMKM di Kecamatan Jombang.